

ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS AKIBAT HUKUM TIDAKTERPENUHINYA KETENTUAN PROSEDURAL DALAM PENYUSUNAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP)(Studi Tentang Hak-hak Tersangka atas Pendampingan Kuasa Hukum di Polres Malang)

 Oleh: ADLY FUAD (03400094)

Law

Dibuat: 2008-04-25 , dengan 3 file(s).

Keywords: Akibat Hukum, Tindak Pidana, Prosedural BAP.

Obyek studi ini adalah mengenai hak-hak tersangka yang diancam pidana diatas 5 tahun atas pendampingan kuasa hukum dalam proses penyusunan berita acara pemeriksaan (BAP) oleh penyidik di Polres Malang.

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang mempelajari secara empiris mengenai pelaksanaan ketentuan prosedural dalam penyusunan berita acara pemeriksaan dan membahas permasalahan-permasalahan yang dikemukakan, sehingga memperoleh hasil yang benar-benar sesuai secara yuridis sosiologis. Sedangkan pentingnya penelitian sosiologis untuk mencoba mengetahui pelaksanaan tentang prosedural pembuatan berita acara pemeriksaan di Polres Malang.

Landasan Pelaksanaan ketentuan prosedural dalam penyusunan berita acara pemeriksaan tentang hak-hak tersangka yang diancam pidana diatas 5 tahun namun tidak mendapat pendampingan kuasa hukum dalam penyusunan Berita Acara Pemeriksaan yang telah diatur didalam KUHAP dan Surat Keputusan No. Pol:Skep/1205/IX/2000 Tentang Revisi Himpunan JUKLAK dan JUKNIS Proses Penyidikan Tindak Pidana yang ditetapkan di Jakarta pada Tanggal 11 September 2000, bahwa hak-hak tersangka yang diancam pidana diatas 5 tahun atas pendampingan kuasa hukum sudah diatur dengan jelas.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa didalam praktek proses penyusunan BAP, hak-hak tersangka atas pendampingan kuasa hukum seringkali diabaikan begitu saja, ini terjadi karena tidak ada satu pun peraturan yang memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran hak-hak tersangka atas pendampingan kuasa hukum dalam proses penyusunan BAP kepolisian, sehingga para aparat penegak hukum sering mengabaikan hal tersebut. Secara keseluruhan berkas perkara yang tersangka yang diancam pidana diatas 5 tahun namun tidak didampingi oleh kuasa hukum pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 berjumlah 327 berkas perkara. Adapun jumlah berkas perkara menurut jenis tindak pidana pada tahun 2005 sampai dengan 2006 sebagai berikut; kasus perjudian 117 berkas, kasus curas 20 berkas, kasus pencabulan 47 berkas, kasus pencurian dengan pemberatan 31 berkas, kasus pemerkosaan 11 berkas, kasus persetubuhan 14 berkas, kasus pembunuhan 2 berkas, kasus perdagangan wanita 2 berkas, kasus pembalakan liar 2 berkas, kasus keterangan palsu 3 berkas, kasus mengedarkan uang palsu 3 berkas, kasus pemerasan 1 berkas, kasus kekerasan seksual, kasus penggelapan 1 berkas.

Faktor-faktor yang melatar belakangi tersangka yang diancam pidana diatas 5 tahun namun tidak didampingi oleh kuasa hukum yakni; pertama, bahwa tersangka tidak mempunyai biaya untuk memakai jasa penasehat hukum. Kedua, bahwa tersangka mengaku mampu menjalankan pemeriksaan dan menghadapi kasusnya sendiri. Ketiga, bahwa tersangka tidak diberitahukan tentang hak-hak tersangka sehingga tidak didampingi oleh kuasa hukum.

Dalam proses penyusunan BAP kepolisian, terikat dengan Surat Keputusan No.

Pol:Skep/1205/IX/2000 Tentang Revisi Himpunan JUKLAK dan JUKNIS Proses Penyidikan

Tindak Pidana yang ditetapkan di Jakarta pada Tanggal 11 September 2000, serta pasal 143 ayat 3 KUHAP. Jika BAP tidak memenuhi syarat materiil maka BAP itu adalah cacat hukum, yang juga menjadi Dakwaan akan menjadi Batal Demi Hukum. Sedangkan jika BAP apabila tidak memenuhi ketentuan formil, maka tidak berakibat hukum apapun. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1565 K.Pid/1991, tertanggal 16 September 1993.

Procedure of criminal code (KUHP) has arranged about human right (HAM) from accused from investigation process, investigation, prosecution, conference, decision and execution of judge decision. But in practice often procedural rules in making of minutes of inspection (BAP) especially about the accused rights to power of attorney associate is disregarded off hand. From the idea, hence writer takes its (the problem formula is as follows; 1). What the accused rights menaced by crime to 5 year to power of attorney associate in process of compilation of minutes of inspection (BAP) by investigator in unlucky polres? 2). Factors any kind of surrounding the accused menaced by crime to 5 year is not consorted by power of attorney? 3). Is the accused legal consequences menaced by crime to 5 year but doesn't get power of attorney associate in compilation of minutes of inspection (BAP) by police investigator if don't pursuant to procedural? Approach method applied is method yuridis sosiologis about execution of procedural rule in compilation of minutes of inspection and studies problems told, causing obtains result which really according to in yuridis sosiologis. Yuridis that is solution based on law and regulation arranging about procedural of making of minutes of inspection. Sosiologis that is by seeing practice of field in making of minutes of inspection done by investigator. Analysis method applied by writer is descriptive analysed, where the, analysed to be presented in the form of kongkret.

Based on result of research is obtained conclusion that in practice process of compilation BAP, the accused rights to power of attorney associate often is disregarded off hand, this happened for absense of one also regulation giving assertive sanction to collision of the accused rights to power of attorney associate in process of compilation of BAP kepolsian, so that the law enforcer government officers often disregard the thing. As a whole the accused law suit menaced by crime to 5 year but is not consorted by power of attorney in the year 2005 to 2006 amounts to 327 law suits. As for law suit amounts according to its (the crime type in the year 2005 and 2006 as follows; gambling case of 117 bundles, case curas 20 bundles, desecrate deed case 47 bundles, theft case with ballast 31 bundles, rapist case of 11 bundles, maltreatment case of 5 bundle, case runs away with woman of 7 bundle, coition case of 14 bundles, murder case of 2 bundle, commerce case of woman 2 bundle, logging of wild 2 bundle, case gives description of false 3 bundle, case circularizes bad coin 3 bundle, extortion case of 1 bundle, sexual hardness case, wiper case 1 bundle. in process of compilation of bap police, tied by letter decision No.

Pol:Skep/1205/IX/2000 about gathering revision juklak and juknis investigation process of crime specified in Jakarta on 11 September 2000, and section 143 article 3 KUHAP.

If BAP material ineligibility hence bap is law handicap, also becomes assertion will become cancelation for the shake of law. While if BAP if didn't pursuant to formal, hence doesn't cause any law. This thing is as according to Yurisprudensi number appellate court 1565 K.pid/1991, dated 16 September 1993.